



**GERMAS**  
Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa

# RENCANA STRATEGIS

## DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

# 2025-2026



**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN  
NOMOR : 440/089/401.103/2024**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN  
TAHUN 2025-2026**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 sebagai pedoman bagi pj. Wali kota untuk menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2025-2026 berdasar RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;

- 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
- 24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043;
- 25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022;
- 26. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun Tahun 2025-2026
- 27. Peraturan Walikota Madiun Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN TAHUN 2025-2026.**

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kedua Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Sub Koordinator, Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah, Direktur *UOBK* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N  
pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN



**dr. DENIK WURYANI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671227 200212 2 001

# DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## BAB VIII PENUTUP



# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2025-2026 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun tahun 2025-2026.

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 2025-2026 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan. Dengan demikian, dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kinerja tahunan (Renja). Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan Pembangunan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Madiun.

**KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA MADIUN**



**Dr. DENIK WURYANI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671227 200212 2 001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 2025-2026 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun tahun 2025-2026. Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumber daya kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota. Tupoksi tersebut sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka mewujudkan Visi Walikota

Madiun “Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”, dengan Misi “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun”. Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun juga merupakan sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional, Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 - 2026.

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dilakukan melalui suatu tahapan proses membangun komitmen dan kesepakatan para pelaksana tugas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, UPT dan kesepahaman dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan lainnya termasuk didalamnya dengan para pelaksana pembangunan kesehatan dari kabupaten/kota melalui sistem asistensi, fasilitasi, koordinasi, dan sosialisasi yang mendalam hingga tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan penyusunan renstra ini juga di fasilitasi penuh oleh Bappelitbangda Kota Madiun selaku koordinator dalam penyusunan dokumen penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Madiun.

Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Walikota Madiun dan Masyarakat Kota Madiun. Disamping itu Renstra merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya.

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 2025-2026 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 2 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  37. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  39. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun Tahun 2025-2026;
  40. Peraturan Walikota Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Inmendagri 52 Tahun 2022 dilandaskan pada tujuan mendasar untuk mengisi celah dalam perencanaan jangka menengah daerah, yang pada gilirannya akan mendorong bahwa wilayah yang masa perencanaan RPJMD-nya telah berakhir dapat mengarahkan periode perencanaan 2024 hingga 2026. Dalam hal ini, Rancangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun akan berakhir tahun 2024, sehingga Kota Madiun Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 menyesuaikan Inmendagri tersebut. Dengan demikian OPD di Lingkup Kota Madiun Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPD Kota Madiun dan berlaku 2 tahun (2025-2026).

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah:

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.

- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
- c. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
- 2.6 Sumber Daya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
- 2.7 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
- 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

- 3.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
- 3.7 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.8 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi



3.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.10 Penentuan Isu-isu Strategis

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN,**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun**

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Madiun menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut berubah menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, sebagai berikut:

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tersurat didalam Perda Nomor Nomor 8 tahun 2020 pasal 2, bahwa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 tahun 2020 tersebut Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan layanan kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan layanan kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM), peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

3. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

b. Sekretariat ;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
2. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
4. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Dinas;
5. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
6. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas;
7. penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas;
8. penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas;
9. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Perencanaan
- c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- c. Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangandan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita, Dan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa dan Napza, Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangandan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangandan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita, dan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa dan Napza, Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita, Dan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa Dan Napza, Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular Dan Tidak Menular;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita, Dan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa Dan Napza, Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular Dan Tidak Menular;
5. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

- a) Seksi Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Balita, dan Gizi Masyarakat;
- b) Seksi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, Usia Lanjut, Jiwa Dan Napza;
- c) Seksi Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular Dan Tidak Menular.

Seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

d. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan, dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Dan Rumah Sakit. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan;
2. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan, dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan, dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit;
4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan, dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan, dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Dan Rumah Sakit;
6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:

- a) Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- b) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan; dan
- c) Seksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit.

Seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga, Pengembangan UKBM. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga, Pengembangan UKBM;
2. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga, Pengembangan UKBM;
3. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga, Pengembangan UKBM;
4. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga, Pengembangan UKBM;
5. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah Raga, Pengembangan UKBM;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kreatif, Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga, Pengembangan UKBM;
7. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terdiri atas:

- a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kreatif;
- b) Seksi Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga; dan
- c) Seksi Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.

Seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

f. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang pelayanan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sehat, Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi Kependudukan, dan Pembinaan Keluarga Berencana. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijaksanaan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas–tugas pada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
2. penyiapan perumusan kebijakan operasional Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan serta Pembinaan Keluarga Berencana;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan serta Pembinaan Keluarga Berencana;
4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan serta Pembinaan Keluarga Berencana;
5. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi kependudukan serta Pembinaan Keluarga Berencana;
6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri atas:

- a) Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- b) Seksi Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi Kependudukan
- c) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana

Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

g. Unit Organisasi Bersifat Khusus

Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus, Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam



pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. RSUD merupakan unit organisasi bersifat khusus dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

Susunan Organisasi RSUD terdiri atas:

- a) Unsur Pimpinan : Direktur
- b) Unsur Pembantu : Bagian Tata Usaha
- c) Unsur Pelaksana :
  - 1. Bidang Pelayanan
  - 2. Bidang Penunjang
  - 3. Bidang Keuangan

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- 1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit;
- 2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- 3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

#### h. UPTD

UPTD adalah Puskesmas dan merupakan Unit Organisasi Yang Bersifat Fungsional. UPTD Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama pada Dinas Kesehatan. UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- 1. penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- 2. penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

UPTD Puskesmas, terdiri atas:

1. UPTD Puskesmas Manguharjo Kecamatan Manguharjo;
2. UPTD Puskesmas Ngegong Kecamatan Manguharjo;
3. UPTD Puskesmas Demangan Kecamatan Taman;
4. UPTD Puskesmas Banjarejo Kecamatan Taman;
5. UPTD Puskesmas Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo;
6. UPTD Puskesmas Sukosari Kecamatan Kartoharjo.

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:

1. Kepala Puskesmas;
2. Kepala Tata Usaha;
3. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
4. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
5. Penanggung Jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium;
6. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
7. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan;
8. Penanggung Jawab Mutu dan PPI.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun**

Komposisi pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun terdiri dari sejumlah personil yang di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan UPTD-nya, masing-masing mengisi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional

umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun menunjukkan data pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1    Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun per Januari 2024

Jumlah Pegawai	Struktural/ Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf
PNS = 333 PPPK = 88	II = 1 III = 5 IV = 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter : 27</li> <li>- Dokter Gigi : 11</li> <li>- Apoteker : 8</li> <li>- Asisten Apoteker : 37</li> <li>- Bidan : 62</li> <li>- Epidemiolog Kesehatan : 6</li> <li>- Administrator kesehatan : 39</li> <li>- Nutrisionis : 15</li> <li>- Penyuluh Kesehatan Masyarakat : 21</li> <li>- Perawat : 70</li> <li>- Perawat Gigi : 19</li> <li>- Pranata Labkes : 19</li> <li>- Sanitarian : 18</li> <li>- Teknisi Elektro Medis : 3</li> <li>- Perekam Medis : 31</li> <li>- Perencana : 1</li> <li>- Analis SDM Aparatur : 1</li> <li>- Analis Keuangan : 1</li> <li>- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa : 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola Kepegawaian : 3</li> <li>- Pengelola data belanja dan laporan Keuangan : 2</li> <li>- Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi : 1</li> <li>- Pengadministrasi Umum : 8</li> <li>- Pengelola Surat : 2</li> <li>- Pengolah Data : 2</li> <li>- Pengelola Obat dan Alat-alat kesehatan : 2</li> <li>- Pengelola sarana dan prasarana kantor : 1</li> <li>- Pengelola Barang Milik Daerah : 1</li> <li>- Petugas keamanan : 1</li> </ul>
Honorir =			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga BLUD : 26</li> <li>- Kontrak Pemkot : 17</li> <li>- Kontrak Kegiatan (DINKES) : 29</li> </ul>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data sampai dengan Januari 2024, jumlah aset tetap Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.2    Daftar Aset Tetap Dinkes Kota Madiun per Januari Tahun 2024

Gol	Bid	Nama Bidang Barang	Keadaan Per Februari 2022	
			Jumlah	Harga (Rp.)
1		Tanah	0	0,00
	1.01	Tanah	0	0,00
2		Peralatan Dan Mesin	4.707	25.085.167.695,00
	2.01	Alat Besar	4	67.517.400,00
	2.02	Alat Angkutan	121	7.165.326.181,00
	2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	112	3353.726.406,58
	2.04	Alat Pertanian	10	182.434.370,00
	2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.055	1.788.200.753,98

Gol	Bid	Nama Bidang Barang	Keadaan Per Februari 2022	
			Jumlah	Harga (Rp.)
	2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	83	323.332.552,06
	2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	2.476	6.977.084.517,12
	2.08	Alat Laboratorium	567	5.382.430.670,25
	2.09	Alat Persenjataan	3	154.845.000,00
	2.10	Komputer	250	2.457.501.844,45
	2.11	Alat Eksplorasi	0	0,00
	2.12	Alat Pengeboran	0	0,00
	2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	0,00
	2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00
	2.15	Alat Keselamatan Kerja	8	22.000.000,00
	2.16	Alat Peraga	0	0,00
	2.17	Peralatan Proses/Produksi	0	0,00
	2.18	Rambu-Rambu	18	210.768.000,00
	2.19	Peralatan Olahraga	0	0,00
<b>3</b>		<b>Gedung Dan Bangunan</b>	<b>22</b>	<b>1.503.202.000,00</b>
	3.01	Bangunan Gedung	4	1.271.370.000,00
	3.02	Monumen	18	231.832.000,00
	3.03	Bangunan Menara	0	0,00
	3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>Jalan, Jaringan Dan Irigasi</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	4.01	Jalan Dan Jembatan	0	0,00
	4.02	Bangunan Air	0	0,00
	4.03	Instalasi	0	0,00
	4.04	Jaringan	0	0,00
<b>5</b>		<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	5.01	Bahan Perpustakaan	0	0,00
	5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00
	5.03	Hewan	0	0,00
	5.04	Biota Perairan	0	0,00
	5.05	Tanaman	0	0,00
	5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00
	5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00
<b>6</b>		<b>Kontruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>1</b>	<b>462.825.000,00</b>
	6.01	Kontruksi Dalam Pengerjaan	1	462.825.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>4.730</b>	<b>27.051.194.695,44</b>

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengukur kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjelaskan dalam dua indikator yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator *impact* dan capaian Indikator Kinerja yaitu capaian indikator *outcome* dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan jajaran kesehatan diseluruh Kota Madiun. Capaian tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Walikota Madiun dan masyarakat Kota Madiun capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

2.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Kesehatan merupakan indikator *impact* dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Indikator tersebut diwakili dengan beberapa indikator. Perbandingan indikator ini dimulai sesuai dengan periode renstra perubahan kedua, yaitu tahun 2021-2023 karena tahun 2024 belum terlaksana.

Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun (T-C.23)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA SKPD THN KE-			REALISASI CAPAIAN THN KE-			RASIO CAPAIAN THN KE-		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
-1	-2	-8	-9	-10	-13	-14	-15	-13	-14	-15
1	Persentase Keluarga Sehat	50.00 %	52.00%	54.00%	51.00 %	55.00 %	57.00 %	102.00%	105.77 %	105.56%
2	Persentase rumah tangga sehat		70.00%	71.00%		64.88 %	71.00 %		92.69%	100.00%
3	Persentase rumah sehat		88.00%	89.00%		88.33 %	89.70 %		100.38 %	100.79%
4	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri		62.00%	62.50%		80.67 %	86.43 %		130.11%	138.29%
5	Indeks Keluarga Sehat	50.00 %	52.00%	54.00%	51.00 %	55.00 %	57.00 %	102.00%	105.77 %	105.56%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA SKPD THN KE-			REALISASI CAPAIAN THN KE-			RASIO CAPAIAN THN KE-		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
-1	-2	-8	-9	-10	-13	-14	-15	-13	-14	-15
6	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi		90.00%	91.00%		90.00 %	95.50 %		100.00 %	104.95%
7	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas		84.60%	84.80%		85.76 %	86.13 %		101.37 %	101.57%
8	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart		74.00%	76.00%		75.00 %	78.00 %		101.35 %	102.63%
9	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan		98.00%	99.00%		98.73 %	100.30 %		100.74 %	101.31%
10	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se-Kota Madiun		8620.00 %	8640.0 0%		8602.0 0%	8766.0 0%		99.79%	101.46%
11	Persentase rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)		86.92%	87.53%		97.71 %	96.71 %		112.41%	110.49%
12	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target		66.67%	75.00%		91.67 %	91.67 %		137.49 %	122.22%
13	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	89.00 %	90.00%	91.00%	85.47 %	95.00 %	95.50 %	96.03%	105.56 %	104.95%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA SKPD THN KE-			REALISASI CAPAIAN THN KE-			RASIO CAPAIAN THN KE-		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
-1	-2	-8	-9	-10	-13	-14	-15	-13	-14	-15
	yang sesuai standar									
14	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	86.00 %	87.00%	88.00%	87.88 %	90.72 %	88.50 %	102.19%	104.28 %	100.57%
15	<i>Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional</i>		62.54%	63.00%		67.24 %	75.51 %		107.52 %	119.86%
16	Persentase Unmet Need	16.93%	8.00%	7.50%	11.90%	6.74%	4.73%	129.71%	115.75 %	136.93%
17	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	80.25 %	81.00%	82.00%	81.00 %	87.37 %	87.51 %	100.93%	107.86 %	106.72%
18	Jumlah SSK	4	7	8	4	11	13	100.00%	157.14 %	162.50%
19	Jumlah Kampung KB yang berstandar paripurna	3	4	5	3	7	7	100.00%	175.00 %	140.00%

2.3.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Indikator tersebut dirinci dalam 12 indikator yang target dan pencapaiannya digambarkan selama 2 tahun seperti dilihat pada tabel 2.5.



Tabel 2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2021– 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi		
				2021	2022	2023
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	100.00%	100.00%	100.12%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	101.70%	100.74%	100.38%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	100.49%	100.74%	101.30%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	100.65%	100.00%	100.20%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	98.18%	100.00%	100.00%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	106.71%	104.52%	110.62%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	100.48%	103.35%	102.57%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	37.18%	48.13%	62.03%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	163.37%	123.98%	108.84%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100.00%	116.07%	105.66%	110.32%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	119.10%	110.83%	113.53%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi		
				2021	2022	2023
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodefiviency virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100.00%	88.14%	96.36%	114.34%

**Tabel 2.5 (T-C24)**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
<b>102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>									
<b>0300 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
<b>10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
10201201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1020120101 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			172,825,700			159,746,400			92.43%
1020120106 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	203,788,360	227,308,120	124,754,400	191,152,657	205,608,410.00	124,754,400	93.80%	90.45%	100.00%
1020120107 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32,825,900			13,483,900			41.08%
10201202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1020120201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33,581,004,539	43,253,539,098	46,266,894,960	31,284,043,942	38,024,599,064	45,059,692,551	93.16%	87.91%	97.39%
10201206 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1020120602 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	463,220,000	1,740,949,830	1,847,022,800	2,765,076,464	1,629,630,003	1,719,767,385	596.93%	93.61%	93.11%
1020120609 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,933,282,176	653,440,000	751,220,000	403,462,703	849,361,672	749,968,652	10.26%	129.98%	99.83%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
10201209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1020120901 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237,661,800	411,319,200	321,706,000	199,382,427	249,350,890	227,473,629	83.89%	60.62%	70.71%
1020120909 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74,116,420	123,835,350	24,663,000	58,650,304	110,010,500	23,618,446	79.13%	88.84%	95.76%
1020120910 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	317,430,550	412,370,450	122,627,000	241,327,550	200,089,025	121,023,000	76.03%	48.52%	98.69%
<b>10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>									
10202201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1020220109 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	249,688,080		246,629,080	240,074,750		238,461,800	96.15%		96.69%
1020220114 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,446,843,368	1,815,342,668	2,347,087,985	1,420,268,815	1,698,702,208	2,090,542,439	58.04%	93.57%	89.07%
1020220115 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	105,676,000	106,092,000	158,439,200	96,288,000	103,631,966	130,140,200	91.12%	97.68%	82.14%
1020220116 Pengadaan Obat, Vaksin	5,136,644,620	2,685,523,349	2,904,515,327	4,462,392,675	2,654,566,246	2,871,057,196	86.87%	98.85%	98.85%
1020220117 Pengadaan Bahan Habis Pakai	852,124,925	658,256,836	651,790,003	679,428,406	596,175,900	546,421,698	79.73%	90.57%	83.83%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1020220120 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35,081,150		104,380,000	35,077,351		87,726,080	99.99%		84.04%
1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	27,887,000	68,557,000		27,758,700	68,552,100		99.54%	99.99%	
10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020220201 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	279,854,490	321,931,900	883,311,400	248,792,248	325,996,900	877,702,400	88.90%	101.26%	99.37%
1020220202 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32,116,700	61,848,500	49,007,200	27,616,300	56,377,250	46,907,200	85.99%	91.15%	95.71%
1020220203 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	79,655,700	55,068,750	84,232,800	68,563,930	51,459,250	71,378,800	86.08%	93.45%	84.74%
1020220204 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28,089,000	250,059,150	242,621,000	26,758,450	221,897,570	235,939,910	95.26%	88.74%	97.25%
1020220205 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10,601,000	115,602,000	97,973,500	10,518,950	107,499,800	89,808,892	99.23%	92.99%	91.67%
1020220206 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	128,785,500	222,209,500	56,621,200	127,272,250	205,391,750	52,281,200	98.82%	92.43%	92.34%
1020220207 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1,440,000	66,844,600	50,753,600	1,440,000	62,444,400	41,397,600	100.00%	93.42%	81.57%
1020220208 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4,000,000	9,477,000	13,548,000	3,967,400	7,862,500	12,148,000	99.19%	82.96%	89.67%
1020220209 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3,850,000	29,020,000	202,012,000	3,675,850	22,105,000	192,333,200	95.48%	76.17%	95.21%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1020220210 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	38,168,000	109,066,200	64,735,000	38,158,200	105,933,190	62,699,200	99.97%	97.13%	96.86%
1020220211 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19,320,000	220,133,900	53,440,000	17,954,000	187,589,070	50,292,000	92.93%	85.22%	94.11%
1020220212 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	152,359,000	223,106,250	199,463,200	141,789,748	206,666,964	191,878,200	93.06%	92.63%	96.20%
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	275,896,000	397,827,630		200,994,172	216,811,500		72.85%	54.50%	
1020220215 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	139,896,800	177,449,880	1,488,729,800	135,668,250	5,192,231,100	1,456,931,650	96.98%	2926.03%	97.86%
1020220216 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	431,071,050	427,411,700	207,449,500	390,375,530	211,097,550	187,386,500	90.56%	49.39%	90.33%
1020220217 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	505,511,420	624,438,950	115,042,400	427,438,230	584,335,690	97,728,700	84.56%	93.58%	84.95%
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18,375,150			14,653,100			79.74%		
1020220220 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5,401,822,000	114,780,000	112,452,800	2,281,381,825	114,186,000	95,852,800	42.23%	99.48%	85.24%
1020220221 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			36,348,000			34,730,200			95.55%
1020220222 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	121,363,000	59,555,950	55,294,000	112,102,532	55,999,400	52,863,200	92.37%	94.03%	95.60%
1020220225 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	757,930,000	256,104,000	475,514,250	613,772,338	196,008,100	374,797,800	80.98%	76.53%	78.82%
1020220226 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41,560,722,330	34,508,320,600	33,448,581,200	37,649,212,069	32,001,925,705	31,981,761,480	90.59%	92.74%	95.61%

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
1020220229 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	102,183,260	688,802,050	324,109,600	90,569,190	601,938,050	199,567,500	88.63%	87.39%	61.57%
1020220234 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5,562,648,950	4,956,624,628	2,152,376,574	4,388,684,446	3,733,199,258	2,121,744,844	78.90%	75.32%	98.58%
1020220235 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		468,396,950	220,947,900		167,884,419	191,905,400		35.84%	86.86%
1020220238 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1,297,514,000	842,316,000	683,036,000	645,880,000	746,519,900	673,973,200	49.78%	88.63%	98.67%
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		8,503,100			8,402,400			98.82%	
<b>10203 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>									
10203202 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	48,750,000	45,000,000		45,000,000	45,000,000		92.31%	100.00%	
1020320203 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			42,419,000			42,419,000			100.00%
10203203 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1020320301 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	186,839,050	220,299,800	851,226,000	152,567,300	302,491,250	706,796,874	81.66%	137.31%	83.03%
<b>10204 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>									
10204201 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
1020420101 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	168,168,700	74,168,200	58,600,000	147,682,751	32,752,800	55,550,500	87.82%	44.16%	94.80%
10204204 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
1020420401 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10,208,000	23,081,000	32,795,000	8,707,640	20,364,750	31,126,000	85.30%	88.23%	94.91%
<b>10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>									
10205201 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1020520101 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	283,676,000	316,160,100	504,002,736	214,357,088	309,984,230	474,358,481	75.56%	98.05%	94.12%
10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020520301 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	721,645,850	1,946,482,940	2,349,559,800		1,658,661,470	2,317,745,985	0.00%	85.21%	98.65%
<b>0300 Puskesmas Banjarejo</b>									
<b>10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>									
10202201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1020220120 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			31,286,000			7,020,000			22.44%
10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020220201 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24,717,400	39,966,780	38,950,800	24,695,800	51,943,400	38,950,000	99.91%	129.97%	100.00%
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6,885,600	7,437,600		6,785,600	7,436,750		98.55%	99.99%	
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		800,000			800,000			100.00%	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14,218,220	12,226,660		14,218,220	12,219,800		100.00%	99.94%	
1020220205 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12,073,050	45,533,500	6,200,000	8,473,050	45,273,400	6,200,000	70.18%	99.43%	100.00%
1020220206 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		300,000	4,650,000		300,000	4,650,000		100.00%	100.00%
1020220207 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			1,000,000			1,000,000			100.00%
1020220210 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		1,200,000	1,500,000		1,200,000	1,500,000		100.00%	100.00%
1020220211 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		12,504,800	2,250,000		12,476,000	1,500,000		99.77%	66.67%
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		8,658,000			8,658,000			100.00%	
1020220213 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	207,070,000	415,791,000	-	95,870,000	314,948,500		46.30%	75.75%	
1020220215 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	392,080,300	732,118,770	1,028,370,800	309,245,300	662,124,380	1,027,843,000	78.87%	90.44%	99.95%
1020220216 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			32,966,000			32,966,000			100.00%
1020220217 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	57,382,750	43,950,000	9,793,900	56,312,750	43,603,200	9,560,600	98.14%	99.21%	97.62%
1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	59,347,520	113,345,520	66,538,400	59,347,520	113,339,950	60,778,400	100.00%	100.00%	91.34%
1020220220 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60,238,340	43,747,760	3,200,000	57,520,600	41,749,559	1,650,000	95.49%	95.43%	51.56%

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
1020220225 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	75,702,050	249,544,260	46,970,000	67,402,050	247,158,750	45,820,000	89.04%	99.04%	97.55%
1020220228 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			499,200			332,800			66.67%
1020220233 Operasional Pelayanan Puskesmas	3,485,758,770	2,334,953,350	2,320,312,000	3,181,791,447	2,301,345,277	2,236,369,728	91.28%	98.56%	96.38%
1020220236 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1,200,000			1,200,000			100.00%
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		6,000,000			1,440,000			24.00%	
1020220240 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			500,000			250,000			50.00%
1020220242 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			100,000			-			0.00%
<b>10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>									
<b>1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Banjarejo	22,428,450			22,428,450			100.00%		
10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1020520301 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			63,189,900			61,726,000			97.68%
<b>0300 Puskesmas Demangan</b>									
<b>10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>									
10202201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1020220120 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			28,827,000			5,340,000			18.52%
10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020220201 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12,612,000	13,627,000	24,370,800	12,612,000	13,585,000	24,306,400	100.00%	99.69%	99.74%
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3,353,000	504,000		3,353,000	504,000		100.00%	100.00%	
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		8,490,650			8,490,650			100.00%	
1020220204 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3,850,000	41,653,650	11,350,000	3,850,000	41,653,650	11,350,000	100.00%	100.00%	100.00%
1020220205 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47,894,800	45,918,050	6,600,000	43,894,800	45,915,000	6,600,000	91.65%	99.99%	100.00%
1020220207 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			5,332,000			5,332,000			100.00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1020220210 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		6,843,600	1,500,000		6,843,600	1,500,000		100.00%	100.00%
1020220211 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		6,738,000	3,000,000		6,738,000	3,000,000		100.00%	100.00%
1020220212 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		1,670,500	11,000,000		1,670,500	11,000,000		100.00%	100.00%
1020220213 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	189,000,000	400,730,000	-	144,315,000	302,010,000		76.36%	75.36%	
1020220215 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	338,309,100	487,866,050	849,704,400	247,808,930	487,599,050	849,087,100	73.25%	99.95%	99.93%
1020220216 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		27,966,000	39,135,300		27,966,000	39,110,000		100.00%	99.94%
1020220217 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	32,463,000	28,780,900	8,063,300	31,198,000	27,672,900	7,788,100	96.10%	96.15%	96.59%
1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	93,468,350	149,758,800	85,471,200	90,560,990	147,490,000	85,471,200	96.89%	98.49%	100.00%
1020220220 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	53,095,100	24,956,450	9,200,000	52,050,550	11,669,802	3,800,000	98.03%	46.76%	41.30%
1020220225 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46,424,650	204,597,270	35,464,000	42,624,650	195,571,700	34,764,000	91.81%	95.59%	98.03%
1020220228 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			416,000			259,500			62.38%
1020220233 Operasional Pelayanan Puskesmas	3,012,051,520	2,053,143,080	2,113,717,000	2,765,611,483	1,980,596,360	1,962,712,266	91.82%	96.47%	92.86%

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
1020220236 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			500,000			500,000			100.00%
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		6,500,000			10,000,000			153.85%	
1020220240 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			750,000			350,000			46.67%
1020220242 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			100,000			-			0.00%
<b>10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>									
<b>1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									
<b>1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Demangan</b>									
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Manguharjo	34,172,000			32,122,000			94.00%		
10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020520301 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			34,834,000			3,024,000			8.68%

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
0300 Puskesmas Manguharjo									
10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
10202201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1020220120 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			27,642,000						0.00%
10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020220201 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,682,000	15,926,700	26,032,000	2,682,000	15,125,850	25,932,000	100.00%	94.97%	99.62%
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		150,000			100,000	3,650,000		66.67%	
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		8,163,950			0			0.00%	
1020220204 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7,623,000	6,264,000	3,750,000	4,023,000	6,264,000		52.77%	100.00%	0.00%
1020220205 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10,426,500	15,328,400	6,300,000	6,108,700	14,921,700	6,000,000	58.59%	97.35%	95.24%
1020220207 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		2,580,400	2,592,000		2,580,400	2,392,000		100.00%	92.28%
1020220210 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		11,675,500	3,000,000		8,140,500	3,000,000		69.72%	100.00%
1020220211 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		2,197,000	1,300,000		2,047,000	1,250,000		93.17%	96.15%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1020220212 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		3,684,000	3,841,200		3,434,000	3,341,180		93.21%	86.98%
1020220213 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	185,943,970	437,322,500	-	159,775,000	372,011,500		85.93%	85.07%	
1020220215 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	262,191,000	366,063,700	583,664,600	170,363,000	365,853,250	553,989,350	64.98%	99.94%	94.92%
1020220216 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			27,962,000			27,916,000			99.84%
1020220217 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	62,438,700	53,518,650	7,583,800	54,474,700	48,276,750	3,949,000	87.25%	90.21%	52.07%
1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	159,078,900	268,764,470	128,433,600	155,102,900	252,989,250	128,433,600	97.50%	94.13%	100.00%
1020220220 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7,751,280	29,145,000	9,814,000	7,751,280	23,203,000	7,014,000	100.00%	79.61%	71.47%
1020220222 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			1,000,000			1,000,000			100.00%
1020220225 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38,100,650	84,139,410	54,438,800	28,496,000	71,482,500	50,794,800	74.79%	84.96%	93.31%
1020220228 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			416,000			416,000			100.00%
1020220233 Operasional Pelayanan Puskesmas	3,194,992,000	2,049,931,320	2,108,353,500	2,883,617,352	2,018,471,901	1,937,702,158	90.25%	98.47%	91.91%
1020220236 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			200,000			-			0.00%

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		5,550,000			5,550,000			100.00%	
1020220240 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			1,000,000			1,000,000			100.00%
1020220242 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			100,000			-			0.00%
<b>10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>									
<b>1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Manguharjo	18,711,250			18,711,250			100.00%		
10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020520301 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			15,510,000			15,009,600			96.77%
<b>0300 Puskesmas Ngegong</b>									
<b>10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>									
10202201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1020220120 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			27,470,000			4,548,000			16.56%
10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020220201 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51,360,000	37,366,250	30,425,200	50,935,350	37,366,250	30,378,000	99.17%	100.00%	99.84%
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		13,693,750			13,693,750			100.00%	
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		550,000			450,000			81.82%	
1020220204 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10,607,500	10,057,500	4,900,000	10,307,500	10,057,500	4,650,000	97.17%	100.00%	94.90%
1020220205 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10,371,600	6,999,970	9,400,000	7,071,600	6,999,950	9,400,000	68.18%	100.00%	100.00%
1020220207 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			3,864,000			3,864,000			100.00%
1020220210 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		100.00%	100.00%
1020220211 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		12,111,800	1,750,000		12,111,800	1,750,000		100.00%	100.00%
1020220213 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	186,800,000	439,131,000	-	109,145,000	365,726,000		58.43%	83.28%	
1020220215 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	219,662,000	379,094,220	614,653,800	142,040,850	376,217,100	606,256,000	64.66%	99.24%	98.63%
1020220216 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			15,140,000			15,140,000			100.00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1020220217 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	74,217,270	44,011,500	12,524,000	74,010,270	57,591,250	12,524,000	99.72%	130.86%	100.00%
1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	95,854,050	192,658,150	127,180,600	78,252,850	192,457,500	127,174,800	81.64%	99.90%	100.00%
1020220220 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15,205,830	10,629,500	2,650,000	4,559,000	9,379,200	2,350,000	29.98%	88.24%	88.68%
1020220222 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			100,000			100,000			100.00%
1020220225 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21,546,250	173,657,360	28,708,000	15,846,250	189,716,850	28,108,000	73.55%	109.25%	97.91%
1020220228 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			166,400			83,200			50.00%
1020220233 Operasional Pelayanan Puskesmas	2,485,579,700	1,405,481,200	1,663,487,100	2,364,416,870	1,468,155,649	1,633,781,680	95.13%	104.46%	98.21%
1020220236 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			250,000			100,000			40.00%
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		7,500,000			7,500,000			100.00%	
1020220240 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			1,000,000			1,000,000			100.00%
1020220242 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			100,000			-			0.00%
<b>10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>									
<b>1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta</b>									

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
<b>Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Ngegong	15,027,350			15,027,350			100.00%		
10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020520301 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			42,234,000			42,234,000			100.00%
<b>0300 Puskesmas Sukosari</b>									
<b>10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>									
10202201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1020220120 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			29,368,000			3,060,000			10.42%
10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020220201 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4,970,000	24,013,750	22,668,000	4,970,000	24,013,750	22,668,000	100.00%	100.00%	100.00%
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		6,335,000			6,335,000		#DIV/0!	100.00%	

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		15,551,400			15,551,400			100.00%	
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		7,528,750			7,528,750			100.00%	
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		9,643,100			9,630,200			99.87%	
1020220206 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		15,952,250	10,584,000		15,952,250	9,984,000		100.00%	94.33%
1020220207 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			6,158,000			6,008,000			97.56%
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		3,729,250			3,729,250			100.00%	
1020220211 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		7,591,000	1,000,000		6,041,000	1,000,000		79.58%	100.00%
1020220212 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		2,800,000	1,100,000		1,100,000	1,100,000		39.29%	100.00%
1020220213 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	194,900,000	569,655,000	-	122,750,000	489,415,000		62.98%	85.91%	
1020220215 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	308,307,480	478,014,480	739,242,200	218,948,730	475,089,450	653,205,600	71.02%	99.39%	88.36%
1020220216 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		14,977,500	600,000		14,977,500	600,000		100.00%	100.00%
1020220217 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	71,604,950	44,858,750	17,923,400	68,141,950	43,562,750	14,897,500	95.16%	97.11%	83.12%
1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	55,214,800	102,115,170	102,376,400	55,214,800	113,690,500	102,364,000	100.00%	111.34%	99.99%

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
1020220220 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	57,379,170	283,586,550	9,200,000	56,934,685	300,535,150	6,800,000	99.23%	105.98%	73.91%
1020220225 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	103,571,100	13,611,250	34,952,000	99,569,250	136,112,500	34,452,000	96.14%	100.00%	98.57%
1020220228 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			416,000			332,800			80.00%
1020220233 Operasional Pelayanan Puskesmas	2,981,649,500	1,972,708,800	1,844,816,500	2,814,615,096	1,695,471,134	1,765,694,513	94.40%	85.95%	95.71%
1020220236 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			250,000			250,000			100.00%
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		1,600,000			1,600,000			100.00%	
1020220240 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			1,000,000			900,000			90.00%
1020220242 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			100,000			-			0.00%
<b>10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>									
<b>1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Sukosari	23,078,750			22,328,750			96.75%		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020520301 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			114,412,000			110,544,400			96.62%
<b>0300 Puskesmas Tawangrejo</b>									
<b>10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>									
10202201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1020220120 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			30,407,000			5,676,000			18.67%
10202202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1020220201 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7,764,000	11,591,500	21,790,400	7,764,000	11,591,500	21,790,400	100.00%	100.00%	100.00%
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12,062,000	2,613,250		12,062,000	2,613,250		100.00%	100.00%	
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3,100,000			3,100,000			100.00%	
1020220204 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	700,000	26,514,000	5,700,000	5,246,250	26,514,000	5,700,000	749.46%	100.00%	100.00%
1020220205 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8,066,250	16,453,100	3,200,000	700,000	16,451,900	3,200,000	8.68%	99.99%	100.00%



Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		27,974,350			27,974,340			100.00%	
1020220207 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			7,440,000			7,440,000			100.00%
1020220210 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		11,950,500	1,000,000		11,950,500	1,000,000		100.00%	100.00%
1020220211 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		5,976,000	1,350,000		5,973,000	1,250,000		99.95%	92.59%
1020220212 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		2,200,000	500,000		2,200,000	500,000		100.00%	100.00%
1020220213 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	200,325,000	442,300,820	-	134,200,000	378,709,800		66.99%	85.62%	
1020220215 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	268,178,580	307,101,850	570,850,600	239,281,280	307,019,850	564,923,550	89.22%	99.97%	98.96%
1020220216 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			7,249,600			7,248,000			99.98%
1020220217 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	37,463,850	41,957,750	21,519,000	37,213,850	41,957,750	20,640,500	99.33%	100.00%	95.92%
1020220218 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	113,658,050	154,331,200	101,388,000	113,648,050	152,926,950	101,388,000	99.99%	99.09%	100.00%
1020220220 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	54,784,400	92,313,250	7,453,600	52,630,100	88,301,610	5,753,600	96.07%	95.65%	77.19%
1020220222 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			2,400,000			2,400,000			100.00%
1020220225 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71,706,750	84,577,930	41,752,800	70,006,150	84,577,750	41,152,800	97.63%	100.00%	98.56%

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
1020220228 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			416,000			166,400			40.00%
1020220233 Operasional Pelayanan Puskesmas	2,851,842,400	1,527,335,500	1,744,300,500	2,507,325,642	1,700,343,346	1,686,472,011	87.92%	111.33%	96.68%
1020220236 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			200,000			200,000			100.00%
1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		6,750,000			12,450,000			184.44%	
1020220240 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			400,000			400,000			100.00%
1020220242 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			100,000			-			0.00%
<b>10205 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>									
<b>1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Tawangrejo	12,210,250			12,210,250			100.00%		
10205203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
1020520301 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			73,252,000			70,702,000			96.52%
<b>0300 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun</b>									
<b>10201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
10201202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1020120201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28,732,973,180	26,695,251,250	29,935,117,601	24,823,386,290	23,494,560,675	26,677,233,826	86.39%	88.01%	89.12%
10201208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1020120804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,274,000,000	1,239,700,000	770,550,000	1,209,400,000	1,134,500,000	713,450,000	94.93%	91.51%	92.59%
10201210 Peningkatan Pelayanan BLUD									
1020121001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		84,031,040,673	76,729,039,563		83,103,119,611.40	76,650,543,232		98.90%	99.90%
<b>10202 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>									
10202201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
1020220108 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2,393,367,785	3,708,059,005	546,652,000		3,273,664,494.96	537,537,000	0.00%	88.29%	98.33%
1020220112 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,097,330,550	2,470,438,200	22,862,791,500		970,363,546.35	22,862,791,476	0.00%	39.28%	100.00%

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
1020220113 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	697,841,600	3,712,526,300	2,511,199,984		1,456,778,720	2,076,815,550	0.00%	39.24%	82.70%
1020220114 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7,079,020,185	10,239,761,000	3,828,686,000	4,799,129,316	220,769,975	3,289,952,000	67.79%	2.16%	85.93%
1020220116 Pengadaan Obat, Vaksin	5,693,824,665	5,489,674,258	5,712,640,227		5,484,811,763	5,698,562,990	0.00%	99.91%	99.75%
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	89,898,509,500			87,122,559,247			96.91%		
<b>214 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
<b>0300 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
<b>21402 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>									
21402201 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
2140220107 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	12,359,050	218,427,600	93,263,600	12,354,800	291,970,354	93,262,200	99.97%	133.67%	100.00%
2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK		24,754,500			24754500			100.00%	
21402202 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)
2140220209 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			296,715,000			295,345,530			99.54%
2140220212 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	288,596,990	503,670,700	314,642,700	275,774,031.00	489,330,700	312,943,700	95.56%	97.15%	99.46%
2140220213 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		40,370,500	-		40,370,100			100.00%	
<b>21403 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>									
21403201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal									
2140320101 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		5,455,000	120,000,000		5,450,900	119,870,100		99.92%	99.89%
2140320102 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal		25,000,000	-		25,000,000			100.00%	
2140320103 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	120,042,000	20,640,000	-	97,358,090	20,640,000		81.10%	100.00%	
2140320104 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		50,000,000	150,000,000		50,000,000	149,949,200		100.00%	99.97%
2140320106 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		185,707,450	39,000,000		176,613,500	38,433,600		95.10%	98.55%
2140320107 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	220,248,000	121,500,000	144,450,000	207,843,200	118,390,550	144,428,400	94.37%	97.44%	99.99%

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
2140320108 Pengendalian Program KKBPK			80,000,000			75,062,000			93.83%
21403202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									
2140320201 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			4,000,000			4,000,000			
2140320202 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		14,400,000	-		4,849,036			33.67%	
2140320204 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	129,600,000	128,520,000	54,000,000	129,500,000	106,000,000	54,000,000	99.92%	82.48%	100.00%
21403203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									
2140320301 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51,766,000	16,200,000	13,000,000	16,658,950	3,150,000	8,550,000	32.18%	19.44%	65.77%
2140320303 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	960,427,000	539,696,000	781,632,000	164,043,518	275,998,350	461,118,500	17.08%	51.14%	58.99%
2140320306 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,093,381,000	961,932,350	1,158,982,000	1,062,457,806	911,802,350	1,042,518,233	97.17%	94.79%	89.95%
2140320308 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		13,800,000	11,700,000		22,488,900	11,652,000		162.96%	99.59%
21403204 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan									

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
2140320402 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			9,000,000			8,960,000			99.56%
2140320403 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	152,112,000	120,750,000	108,500,000	151,863,950	120,537,900	108,066,000	99.84%	99.82%	99.60%
<b>21404 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>									
21404201 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2140420102 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		206,771,650	361,200,000		201,176,000	353,250,000		97.29%	97.80%
2140420104 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13,412,600	85,072,050	172,520,700	13,412,600	82,964,050	152,643,200	100.00%	97.52%	88.48%
2140420105 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		818,760,000	973,800,000		475,780,000	628,512,000		58.11%	64.54%

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		
	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)
2140420107 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	244,082,600	333,523,964	280,886,100	232,351,759	326,161,900	274,779,060	95.19%	97.79%	97.83%



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa tantangan yang perlu untuk ditindaklanjuti di Kota Madiun adalah upaya intensif untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting, AKI dan AKN, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan cakupan imunisasi. Faktor determinan kematian ibu dan bayi serta stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular juga perlu untuk melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Tantangan lain yang juga tidak bisa diabaikan adalah tentang ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di Kota Madiun.

Tantangan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun kedepan ini menjadi sebuah peluang bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun untuk mengembangkan pelayanan bidang kesehatan di Kota Madiun.

Adapun pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan dalam dua tahun kedepan, terutama pada UPTD dan UOBK Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah :

1. Pengembangan layanan di Puskesmas yang menjadi UPT dan RSUD Kota Madiun yang menjadi UOBK Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun ;
2. Peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Mempertahankan status akreditasi puskesmas dan RSUD yang sudah paripurna;
4. Pengembangan aplikasi pelatihan berbasis online;
5. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) serta SPM Rumah Sakit

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun**

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Dari kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. T-B.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Masih perlu peningkatan Indeks Keluarga Sehat sebagai indikator kesehatan masyarakat	Persentase rumah tangga sehat sampai dengan September 2023 baru mencapai 70,36%	Perubahan definisi indikator merokok, yang awalnya merokok di dalam rumah tidak dihitung sebagai perokok berubah menjadi merokok
	Terdapat banyak kebijakan baru terkait program kesehatan. Dengan demikian dibutuhkan upgrade kompetensi kader dalam membantu mendukung tercapainya tujuan program kesehatan	Kebijakan dan peraturan di bidang kesehatan sangat dinamis perubahannya sehingga memerlukan updating ilmu
	Belum semua Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	Kurangnya pengetahuan pemilik usaha mengenai pentingnya sertifikat laik hygiene dan sertifikat DAM
	Belum semua kelurahan menerapkan 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Perlunya advokasi ke kelurahan mengenai pentingnya penerapan 5 pilar STBM
Masih perlu peningkatan akses dan mutu	Masih adanya angka kematian bayi dan upaya untuk mempertahankan agar tidak ada kematian ibu	Masih adanya bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan bawaan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
pelayanan kesehatan	Angka penemuan HIVAIDS semakin meningkat dan masih diperlukan skrining ke kelompok berisiko yang belum terjangkau, salah satunya pegawai hotel	Masih ada populasi berisiko yang belum terjangkau untuk VCT HIV AIDS
	Angka prevalensi stunting di kota Madiun masih cukup tinggi meskipun sudah di bawah target nasional	Masih diperlukan intervensi sensitive dan spesifik untuk menurunkan angka stunting
	Komposisi Penduduk Kota Madiun yang sudah pada kategori Aging Population dimana peningkatan umur harapan hidup yang diikuti dengan peningkatan jumlah lansia sehingga diperlukan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	Angka harapan hidup yang semakin tinggi menyebabkan jumlah lansia juga meningkat sehingga diperlukan pelayanan lansia yang lebih komprehensif
	Kondisi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan secara kuantitas sudah sesuai standar, tetapi secara kualitas masih belum sesuai standar, baik secara persyaratan teknis, luasan dan kenyamanan masih kurang representatif	Keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan
	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Belum mencapai 100%	Sasaran SPM Kesehatan berdasarkan hasil Riskesdas 2018 yang hasilnya tidak dapat menggambarkan kondisi sebenarnya di Kota Madiun
	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Belum Optimal	Masih terdapat beberapa indicator yang capaiannya dapat ditingkatkan
	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan tenaga bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan pelayanan anestesi, dialisis dan Intensive Care Unit) dan SDM jabatan fungsional tertentu di beberapa posisi	Keterbatasan lowongan PNS dan PPPK untuk posisi tertentu dan walaupun ada belum ada yang melamar posisi tersebut
	Prevalensi penyakit menular yang masih tinggi serta meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular	Terdapat KLB Polio di Jawa Timur dan Covid-19 masih menjadi pandemi di Indonesia
Masih diperlukan pengendalian penduduk	Masih ada kehamilan tidak diinginkan di usia anak-anak	Belum optimalnya kegiatan PIK R yang menyasar remaja tentang program Bangga Kencana

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Kurangnya keterlibatan berbagai pihak termasuk organsiasi profesi dalam upaya meningkatkan cakupan KB terutama pada KB Pasca Persalinan	Belum adanya MoU dengan Organisasi profesi mengenai kerja sama terutama terkait KB Pasca Persalinan
	Masih ada pasangan usia subur yang tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi	Belum optimalnya kegiatan kelompok kegiatan untuk mensosialisasikan program Bangga Kencana

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD Kota Madiun 2005-2025

Berdasarkan dokumen RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026, isu strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk ke dalam isu strategis utama rangking 2, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan Visi, Misi dan Program, Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD 2019-2024, dapat dijabarkan faktor penghambat dan pendorong sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun

No	Misi Kota Madiun dalam RPJPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Visi:</b> Mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan				
	<b>Misi 2 :</b> meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial	1. Masih ada nya Prevalensi stunting	Masih ada masyarakat yang tidak mau memberikan asupan gizi seimbang karena alasan kesibukan	1. Adanya dukungan anggaran untuk penanggulangan stunting
		1. Meningkatnya angka	Perubahan lingkungan yang	1. <i>Universal Health Coverage</i>

No	Misi Kota Madiun dalam RPJPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	begitu pesat yang dapat memunculkan re-emerging disease	2. Adanya Posbindu PTM
		2. Meningkatkan akses terhadap kualitas lingkungan sehat	1. Belum senua kabupaten/kota memiliki regulasi yg mengatur kesling 2. Daerah berpenduduk besar dan rumah yang padat 3. Masyarakat belum menjadikan sanitasi sebagai kebutuhan	1. Kerjasama dengan program penyediaan sarana sanitasi lewat IPAL komunal, pengelolaan sampah instalasi air minum dan sanitasi sekolah, sanitasi terminal, pasar sehat 2. Penggunaan media televisi, media cetak dan elektronik, dan sosial media untuk promosi kesling

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementrian dan Lembaga pusat. Dikarenakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun menangani dua urusan, maka kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kebijakan Kemenkes dan BKKBN sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di provinsi. Sasaran Indikator Kemenkes dan BKKBN juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat

yang menyebabkan permasalahan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun terkait Sasaran Kemenkes dan BKKBN dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Renstra Kementerian Kesehatan	1. Lemahnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam hal keterkaitan program dan pendanaan	1. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah	1. Akreditasi institusi pendidikan kesehatan
		2. Kualitas lulusan tenaga kesehatan belum siap pakai	2. Belum ada standarisasi kompetensi lulusan tenaga kesehatan	2. Regulasi tentang Internship lulusan dokter umum
		3. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang seringkali tidak tepat waktu	3. Pernebitan e-katalog dan alat kesehatan dari LKPP tidak tepat waktu	3. UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang keterbukaan informasi publik mendorong tranparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan
		4. Akreditasi, sertifikasi dan registrasi menjadi kewenangan pusat	4. Banyak daerah sulit yang tidak termasuk dalam kategori DTPK.	
			5. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Kota Madiun	

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya

No	Hasil KLHS terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 2. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan 3. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta	1. Pembangunan kesehatan belum berwawasan lingkungan 2. Belum ada juknis tentang pembangunan berwawasan lingkungan 3. Belum adanya kesatuan gerak dengan sektor lain dalam peningkatan	1. Lemahnya Koordinasi dengan sektor terkait lingkungan 2. Kurangnya jumlah dan perlunya peningkatan kompetensi sumber daya tenaga	1. Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan adalah pembangunan berwawasan kesehatan 2. Banyak lintas sektor mempunyai tupoksi terkait lingkungan

No	Hasil KLHS terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	meningkatkan pertanian berkelanjutan.	lingkungan sehat 4. Standar Pelayanan Minimal yang diharuskan menjangkau seluruh kelompok usia dan masyarakat berisiko 5. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan pribadi dan lingkungan perlu ditingkatkan		3. Sudah adanya Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah 4. Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang berkembang cukup baik

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil kajian terhadap kondisi pembangunan kesehatan di Kota Madiun dan berbagai isu dan kebijakan kesehatan di tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2025-2026. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 2 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan



menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan kesehatan Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan kesehatan di Kota Madiun.
- 2) Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan Kota Madiun lainnya.
- 3) Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Kota Madiun di berbagai bidang.
- 4) Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kota Madiun.,
- 5) Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kota Madiun.
- 6) Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kota Madiun yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Isu Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, yaitu :

1. Peningkatan pelayanan publik
2. Peningkatan Indeks Keluarga Sehat sebagai indikator kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan
4. Pengendalian Jumlah Penduduk

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun**

Berdasarkan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026, maka Tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat. Tujuan dan sasaran Kota yang didukung oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Kota yang di dukung  
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup dan Menurunnya Prevalensi Stunting

Untuk mendukung tujuan Kota Madiun, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Jangka Menengah pada tahun 2025-2026, yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Meningkatnya Keluarga Sehat
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
4. Terkendalinya jumlah penduduk

Tabel 4.2 (T-C.25)  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		KONDISI AKHIR (2026)
				2023	1	2	
					-2025	-2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat						
		Meningkatnya Pelayanan Publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.38	4.39	4.40	4.40
		Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.57	0.57	0.58	0.58
		Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rata-Rata Indeks Pelayanan Publik Puskesmas dan RSUD di Kota Madiun	4.78	4.78	4.78	4.78
		Terkendalinya Jumlah Penduduk	Contraception Prevalency Rate (CPR) di atas rata-rata Nasional	75.51%	68.50%	69.00%	69.00%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 (T-C.26)  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi		kebijakan	
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat	1	Meningkatnya pelayanan publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Peningkatan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja
					2	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan
					3	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
			2	Peningkatan pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	1	Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pelayanan BLUD
	2	Meningkatnya Keluarga Sehat	2	Meningkatkan Keluarga Sehat	1	Meningkatkan promosi kesehatan tepat sasaran
					2	Meningkatkan Posyandu yang Aktif
					3	Meningkatkan mutu Tempat Pengelolaan Pangan
					4	Meningkatkan rumah tangga ber-STBM
	3	Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	3	Meningkatkan akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Mencapai Universal Health Coverage (UHC) untuk Kota Madiun
					2	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan
					3	Meningkatkan SDM Kesehatan Berkualitas
					4	Meningkatkan Mutu Jejaring Kesehatan
					5	Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Tujuan	Sasaran		Strategi		kebijakan	
					6	Meningkatkan Penilaian Kinerja Puskesmas
					7	Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
	4	Terkendalinya Jumlah Penduduk	4	Mengendalikan Jumlah Penduduk	1	Meningkatkan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
					2	Menurunkan Unmetneed

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2025-2026 terangkum dalam Tabel 6.1 (T-C.27) berikut ini :



Tabel 6.1 (TC-27) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2025-2026

Kode		Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi			
								Tahun-1 (2025)			Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
								target	Rp		target	Rp	target			Rp		
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									110,318,301,500.00			115,973,595,430.00			226,291,896,930.00		Dinkes PP dan KB	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88.00	88	60,024,678,149.00	88.1	63,006,488,350.00	88.1	123,031,166,499.00	Dinkes PP dan KB				
1	2	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100.00%	100%	439,047,000.00	100%	460,999,350.00	100%	900,046,350.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun		
1	2	1	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8 Dokumen	273,326,100.00	8 Dokumen	296,905,350.00	16 Dokumen	570,231,450.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun		
1	2	1	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3 Dokumen	104,800,000.00	3 Dokumen	107,310,000.00	6 Dokumen	212,110,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun		



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	1	2	00017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5 Laporan	60,920,900.00	5 Laporan	56,784,000.00	10 Laporan	117,704,900.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	100%	55,946,579,110.00	100%	59,802,393,057.00	100%	115,748,972,167.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	000201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	418	496 orang/bulan	55,946,579,110.00	496 orang/bulan	59,802,393,057.00	496 orang/bulan	115,748,972,167.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1,621,699,589.00	100%	1,866,076,271.00	100%	3,487,775,860.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	00062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1 Paket	936,699,589.00	1 Paket	1,216,076,271.00	2 Paket	2,152,775,860.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	00069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203	150 Laporan	685,000,000.00	155 Laporan	650,000,000.00	305 Laporan	1,335,000,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	100%	430,668,450.00	100%	219,375,000.00	100%	650,043,450.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Pemerintahan Daerah									
1	2	1	2	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 Unit	154,997,450.00	15 Unit	126,417,000.00	25 Unit	281,414,450.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		75 Unit	275,671,000.00	76 Unit	92,958,000.00	151 Unit	368,629,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	75%	100%	867,690,000.00	100%	33,445,372.00	100%	901,135,372.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	0	0	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	867,690,000.00	12 Laporan	33,445,372.00	24 Laporan	901,135,372.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%	718,994,000.00	100%	624,199,300.00	100%	1,343,193,300.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Pemerintahan Daerah									
1	2	1	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80	109 Unit	405,696,900.00	109 Unit	389,312,000.00	109 Unit	795,008,900.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1 Unit	162,876,000.00	1 Unit	19,013,900.00	1 Unit	181,889,900.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	1	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	273	273 Unit	150,421,100.00	273 Unit	215,873,400.00	273 Unit	366,294,500.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	91.67%	75%	41,557,575,751.00	75%	45,682,086,284.00	75%	87,239,662,035.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi		
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
1	0	0	2	2	0	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	91.40%	90.32%	6,749,269,134.00	91.40%	3,769,622,760.00	91.40%	10,518,891,894.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	0	0	2	2	0	0	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		6 Unit	240,000,000.00	6 Unit	252,000,000.00	12 Unit	492,000,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	0	0	2	2	0	0	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		15 Unit	220,326,000.00	15 Unit	231,342,300.00	30 Unit	451,668,300.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	0	1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	778 Unit	100 Unit	1,170,083,000.00	105 Unit	609,074,064.00	205 Unit	1,779,157,064.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	0	1	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional	619	138 Unit	150,000,000.00	140 Unit	21,964,000.00	278 Unit	171,964,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Maintainance Center									
1	2	2	2	0	0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	163	100 Unit	297,768,032.00	120 Unit	110,000,000.00	220 Unit	407,768,032.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	0	0	1	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	25 Paket	10 paket	4,628,179,402.00	12 paket	2,500,184,061.00	22 paket	7,128,363,463.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	0	0	2	0	1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		12 Paket	42,912,700.00	12 Paket	45,058,335.00	24 Paket	87,971,035.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi					
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
								target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
1	2	2	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	91.67%	75%	34,808,306,617.00	75%	41,912,463,524.00	75%	76,720,770,141.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun					
1	2	2	2	0				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2450	2430 Orang	339,891,900.00	2420 Orang			737,657,666.00	4850 Orang	1,077,549,566.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2338	2318 Orang	55,048,300.00	2308 Orang			160,112,293.00	4626 Orang	215,160,593.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2227	2207 Orang	77,589,500.00	2197 Orang			115,093,020.00	4404 Orang	192,682,520.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9081	8981 Orang	418,713,400.00	8941 Orang	255,696,640.00	17992 Orang	674,410,040.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun					
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31582	31582 Orang	30,698,000.00	31582 Orang	94,668,866.00	63164 Orang	125,366,866.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun					

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi		
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114664	129950 Orang	69,802,300.00	130440 Orang	138,161,623.00	260390 Orang	207,963,923.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30573	34490 Orang	43,368,200.00	35580 Orang	229,196,814.00	70070 Orang	272,565,014.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42970	40710 Orang	27,003,500.00	41064 Orang	257,610,974.00	81774 Orang	284,614,474.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7741	8142 Orang	207,629,500.00	8213 Orang	231,849,877.00	16355 Orang	439,479,377.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	339	343 Orang	112,931,100.00	346 Orang	120,190,567.00	689 Orang	233,121,667.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5076	5729 Orang	783,915,200.00	6394 Orang	246,142,362.00	12123 Orang	1,030,057,562.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5828	6051 Orang	71,392,500.00	6046 Orang	240,444,454.00	12097 Orang	311,836,954.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	206,459,600.00	3 Dokumen	1,416,196,900.00	6Dokumen	1,622,656,500.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3	2 Dokumen	171,619,000.00	2 Dokumen	48,158,500.00	4 Dokumen	219,777,500.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	5 Dokumen	292,075,200.00	5 Dokumen	24,473,500.00	10 Dokumen	316,548,700.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	154,252,800.00	1 Dokumen	154,252,800.00	2 Dokumen	308,505,600.00	Dinkes PP dan KB	
1	2	2	2	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	3 Dokumen	97,124,100.00	3 Dokumen	53,468,400.00	6 Dokumen	150,592,500.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun



Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	374	343 Orang	26,925,600.00	346 Orang	14,400,000.00	689 Orang	41,325,600.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	2 Dokumen	1,016,286,200.00	2 Dokumen	422,163,600.00	4 Dokumen	1,438,449,800.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	0	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36	36 Dokumen	28,497,506,000.00	36 Dokumen	34,754,525,821.00	72 Dokumen	63,252,031,821.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	0	0	2	0	0	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		18 Paket	29,686,000.00	18 Paket	30,062,800.00	36 Paket	59,748,800.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	0	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10	9 Dokumen	376,478,800.00	9 Dokumen	281,754,830.00	18 Dokumen	658,233,630.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7	7 Dokumen	1,096,936,017.00	7 Dokumen	1,088,891,017.00	14 Dokumen	2,185,827,034.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	2	0	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6	6 Unit	11,000,000.00	6 Unit	38,896,000.00	6 Unit	49,896,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	0	0	2	0	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		12 Laporan	1,500,000.00	12 Laporan	1,500,000.00	24 Laporan	3,000,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1 Unit	461,017,000.00	1 Unit	565,000,000.00	1 Unit	1,026,017,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	0	0	2	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1179 Orang	10,815,500.00	1184 Orang	43,266,000.00	2363 Orang	54,081,500.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	0	0	2	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		575 Orang	13,400,500.00	646 Orang	31,896,200.00	1221 Orang	45,296,700.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	0	0	2	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		50 Orang	27,079,300.00	50 Orang	42,570,000.00	100 Orang	69,649,300.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	0	0	2	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		2 Dokumen	80,161,600.00	2 Dokumen	74,162,000.00	4 Dokumen	154,323,600.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	95.50%	95%	608,824,000.00	96%	719,968,500.00	96%	1,328,792,500.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	0	0	2	0	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		100 %	69,282,000.00	100 %	69,282,000.00	100 %	138,564,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	0	0	2	0	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya		6 Dokumen	69,282,000.00	6 Dokumen	69,282,000.00	12 Dokumen	138,564,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Manusia Kesehatan									
1	2	3	2	0	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP	95.5	95%	539,542,000.00	96%	650,686,500.00	96%	1,190,228,500.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	3	2	0	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	615	650 Orang	539,542,000.00	700 Orang	650,686,500.00	1350 Orang	1,190,228,500.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	88.50%	89%	466,827,000.00	90%	98,421,200.00	90%	565,248,200.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	2	4	2	0	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	88	89%	139,761,000.00	90%	25,971,200.00	90%	165,732,200.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	4	2	0	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	2 Dokumen	139,761,000.00	2 Dokumen	25,971,200.00	4 Dokumen	165,732,200.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	4	2	0	4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	89%	89%	327,066,000.00	90%	72,450,000.00	90%	399,516,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	4	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3	2 Dokumen	327,066,000.00	2 Dokumen	72,450,000.00	4 Dokumen	399,516,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	71.00%	71%	2,767,594,600.00	71%	3,787,002,412.00	71%	6,554,597,012.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	5	2	0	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	100%	312,444,600.00	100%	86,889,412.00	100%	399,334,012.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	5	2	0	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1 Dokumen	312,444,600.00	1 Dokumen	86,889,412.00	2 Dokumen	399,334,012.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	5	2	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kota.		100%	2,455,150,000.00	100%	3,700,113,000.00	100%	6,155,263,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
1	2	5	2	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1 Dokumen	2,455,150,000.00	1 Dokumen	3,700,113,000.00	2 Dokumen	6,155,263,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK	13	14 SSK	614,587,000.00	15 SSK	244,288,800.00	15 SSK	858,875,800.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
						Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	7	7 Kampung KB		8 Kampung KB		8 Kampung KB		Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	3	2	0	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	6	6 Sekolah	71,520,000.00	7 Sekolah	24,857,400.00	7 Sekolah	96,377,400.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
4			1												
2	1	3	2	0	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	7	13 Dokumen	71,520,000.00	13 Dokumen	24,857,400.00	26 Dokumen	96,377,400.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
4			0	0											
2	1	2	2	0	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdating	100	100%	543,067,000.00	100%	219,431,400.00	100%	762,498,400.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
4			2	2											
2	1	2	2	0	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0008	27	27 Laporan	494,521,000.00	27 Laporan	166,448,400.00	54 Laporan	660,969,400.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
4			0	0											



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	2	2	0	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		27 Dokumen	48,546,000.00	27 Dokumen	52,983,000.00	54 Dokumen	101,529,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya <i>Unmet Need</i>	4.73	6.80%	2,187,515,000.00	6.75%	1,040,415,084.00	6.75%	3,227,930,084.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	3	2	0	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	100	100%	736,891,000.00	100%	483,940,000.00	100%	1,220,831,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	3	2	0	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4	2 Laporan	140,000,000.00	2 Laporan	80,000,000.00	4 Laporan	220,000,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	3	2	0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	56	12 Laporan	131,754,000.00	12 Laporan	192,642,000.00	24 Laporan	324,396,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi		
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						dan Keluarga Berencana)									
2	1	3	2	0	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		9 Laporan	45,000,000.00	9 Laporan	39,000,000.00	18 Laporan	84,000,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	3	2	0	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa		3 Dokumen	150,000,000.00	3 Dokumen	100,298,000.00	6 Dokumen	250,298,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									
2	1	3	2	0		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		27 Organisasi	270,137,000.00	27 Organisasi	72,000,000.00	27 Organisasi	342,137,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	3	2	4		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader yang melakukan updating data	100	100%	88,687,000.00	100%	67,200,000.00	100%	155,887,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	3	2	0		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150	150 Orang	88,687,000.00	150 Orang	67,200,000.00	300 Orang	155,887,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	3	2	0	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes yang mendapatkan distribusi alkon	100	100%	975,777,000.00	100%	309,598,884.00	100%	1,285,375,884.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
4			3												
2	1	3	2	0	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25	24 Laporan	15,300,000.00	24 Laporan	13,000,000.00	48 Laporan	28,300,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
4			0	0											
2	1	3	2	0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	822	661 Orang	943,827,000.00	661 Orang	284,898,884.00	1322 Orang	1,228,725,884.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
4			0	0											
			3	0											

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	3	2	0	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	4 Laporan	16,650,000.00	4 Laporan	11,700,000.00	8 Laporan	28,350,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	3	2	0	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	100	100%	386,160,000.00	100%	179,676,200.00	100%	565,836,200.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	0	2	0	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		7 Dokumen	3,707,000.00	7 Dokumen	3,707,000.00	14 Dokumen	7,414,000.00	Dinkes PP dan KB	
2	1	3	2	0	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan	7	7 Kampung	382,453,000.00	7 Kampung	175,969,200.00	7 Kampung	558,422,200.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)									
2	1	4				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	87.51	87.70%	2,090,700,000.00	87.80%	1,394,924,800.00	87.80%	3,485,624,800.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	4	2	0	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	31	32%	1,145,700,000.00	32%	449,924,800.00	32%	1,595,624,800.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	0	2	0	0	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		8 Laporan / Dokumen	28,800,000.00	8 Laporan / Dokumen	28,800,000.00	16 Laporan / Dokumen	57,600,000.00	Dinkes PP dan KB	

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	4	2	0	0	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32	32 Laporan	711,456,500.00	32 Laporan	36,576,000.00	64 Laporan	748,032,500.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	0	2	0	0	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		25 Unit	302,686,000.00	25 Unit	302,686,000.00	50 Unit	605,372,000.00	Dinkes PP dan KB	

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	4	2	0	0	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	210	210 Orang	102,757,500.00	210 Orang	81,862,800.00	420 Orang	184,620,300.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	4	0	2	0	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase TPK Kelurahan dalam Mendampingi Keluarga Beresiko Stunting		72 %	945,000,000.00	72 %	945,000,000.00	72 %	1,890,000,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi		
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1	0	2	0	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		10 laporan	450,000,000.00	10 laporan	450,000,000.00	20 Laporan	900,000,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
2	1	0	2	0	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		10 laporan	495,000,000.00	10 laporan	495,000,000.00	20 Laporan	990,000,000.00	Dinkes PP dan KB	Kota Madiun
RSUD Kota Madiun															
								133,093,705,651.00	133,682,054,044.00	266,775,759,695.00					
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88.00	88	127,994,140,651.00	88.1	126,661,125,565.00	88.1	254,655,266,216.00	RSUD	
1	2	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji	100%	100%	35,618,202,540.00	100%	44,158,879,538.00	100%	79,777,082,078.00	RSUD	Kota Madiun

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							ASN perangkat daerah									
1	2	1	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	385 orang/bulan	409 orang/bulan	35,618,202,540.00	409 orang/bulan	44,158,879,538.00	409 orang/bulan	79,777,082,078.00	RSUD	Kota Madiun
1	2	0	2	.	1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah (RSUD)	80%	100%	92,375,938,111.00	100%	82,502,246,027.00	100%	174,878,184,138.00	RSUD	Kota Madiun
1	2	1	2	0	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	92,375,938,111.00	1 Unit Kerja	82,502,246,027.00	1 Unit Kerja	174,878,184,138.00	RSUD	Kota Madiun
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	91.67%	75%	5,099,565,000.00	75%	7,020,928,479.00	75%	12,120,493,479.00	RSUD	Kota Madiun
1	0	0	2	.	0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	91.40%	90.32%	5,099,565,000.00	91.40%	7,020,928,479.00	91.40%	12,120,493,479.00	RSUD	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	2	0013	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (RSUD)	6 Paket	6 Paket	5,099,565,000.00	6 Paket	7,020,928,479.00	6 Paket	12,120,493,479.00	RSUD	Kota Madiun
Puskesmas Manguharjo									2,853,816,000.00		2,375,803,662.00		5,229,619,662.00	Puskesmas Manguharjo	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	91.67%	75%	2,853,816,000.00	75%	2,375,803,662.00	75%	5,229,619,662.00	Puskesmas Manguharjo	Kota Madiun
1	2	2	2	002	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	91.67%	75%	2,853,816,000.00	75%	2,375,803,662.00	75%	5,229,619,662.00	Puskesmas Manguharjo	Kota Madiun
1	2	2	2	00215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Manguharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	405,900,000.00	3 Dokumen	381,003,000.00	6 Dokumen	786,903,000.00	Puskesmas Manguharjo	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	2	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Manguharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	618,566,000.00	1 Dokumen	64,603,662.00	2 Dokumen	683,169,662.00	Puskesmas Manguharjo	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas Manguharjo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	1,829,350,000.00	4 Dokumen	1,930,197,000.00	8 Dokumen	3,759,547,000.00	Puskesmas Manguharjo	Kota Madiun
Puskesmas Ngegong									2,571,015,000.00		2,099,924,222.00		4,670,939,222.00	Puskesmas Ngegong	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	91.67%	75%	2,571,015,000.00	75%	2,099,924,222.00	75%	4,670,939,222.00	Puskesmas Ngegong	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	91.67%	75%	2,571,015,000.00	75%	2,099,924,222.00	75%	4,670,939,222.00	Puskesmas Ngegong	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Ngegong	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	364,976,000.00	3 Dokumen	342,402,000.00	6 Dokumen	707,378,000.00	Puskesmas Ngegong	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	2	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Ngegong	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	617,445,000.00	1 Dokumen	64,044,222.00	2 Dokumen	681,489,222.00	Puskesmas Ngegong	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngegong	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	1,588,594,000.00	4 Dokumen	1,693,478,000.00	8 Dokumen	3,282,072,000.00	Puskesmas Ngegong	Kota Madiun
Puskesmas Sukosari									2,812,153,000.00		2,442,221,774.00		5,254,374,774.00	Puskesmas Sukosari	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	91.67%	75%	2,812,153,000.00	75%	2,442,221,774.00	75%	5,254,374,774.00	Puskesmas Sukosari	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	91.67%	75%	2,812,153,000.00	75%	2,442,221,774.00	75%	5,254,374,774.00	Puskesmas Sukosari	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Sukosari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	497,260,000.00	3 Dokumen	486,450,000.00	6 Dokumen	983,710,000.00	Puskesmas Sukosari	Kota Madiun

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	2	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Sukosari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	617,893,000.00	1 Dokumen	65,771,774.00	2 Dokumen	683,664,774.00	Puskesmas Sukosari	Kota Madiun
1	2	2	2	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukosari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	1,697,000,000.00	4 Dokumen	1,890,000,000.00	8 Dokumen	3,587,000,000.00	Puskesmas Sukosari	Kota Madiun
Puskesmas Tawangrejo										2,733,929,000.00		2,046,215,281.00		4,780,144,281.00	Puskesmas Tawangrejo	
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	91.67%	75%	2,733,929,000.00	75%	2,046,215,281.00	75%	4,780,144,281.00	Puskesmas Tawangrejo	Kota Madiun
1	2	2	2	0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	91.67%	75%	2,733,929,000.00	75%	2,046,215,281.00	75%	4,780,144,281.00	Puskesmas Tawangrejo	Kota Madiun

Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
									Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Tawangrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	335,004,000.00	3 Dokumen	296,004,000.00	6 Dokumen	631,008,000.00	Puskesmas Tawangrejo	Kota Madiun
1	2	2	2	0	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Tawangrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	605,825,000.00	1 Dokumen	61,600,231.00	2 Dokumen	667,425,231.00	Puskesmas Tawangrejo	Kota Madiun
1	2	2	2	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas Tawangrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	1,793,100,000.00	4 Dokumen	1,688,611,050.00	8 Dokumen	3,481,711,050.00	Puskesmas Tawangrejo	Kota Madiun
Puskesmas Banjarejo										3,432,429,000.00		2,641,609,191.00		6,074,038,191.00	Puskesmas Banjarejo	
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	91.67%	75%	3,432,429,000.00	75%	2,641,609,191.00	75%	6,074,038,191.00	Puskesmas Banjarejo	Kota Madiun

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	91.67%	75%	3,432,429,000.00	75%	2,641,609,191.00	75%	6,074,038,191.00	Puskesmas Banjarejo	Kota Madiun
			2												
			0												
			0												
			1												
			2												
1	2	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Banjarejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	706,200,000.00	3 Dokumen	672,959,000.00	6 Dokumen	1,379,159,000.00	Puskesmas Banjarejo	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Banjarejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	663,229,000.00	1 Dokumen	68,650,191.00	2 Dokumen	731,879,191.00	Puskesmas Banjarejo	Kota Madiun
1	2	2	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas Banjarejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	2,063,000,000.00	4 Dokumen	1,900,000,000.00	8 Dokumen	3,963,000,000.00	Puskesmas Banjarejo	Kota Madiun
Puskesmas Demangan									3,152,701,000.00		2,612,347,939.00		5,765,048,939.00	Puskesmas Demangan	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	91.67%	75%	3,152,701,000.00	75%	2,612,347,939.00	75%	5,765,048,939.00	Puskesmas Demangan	Kota Madiun



Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
								Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2	2	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	91.67%	75%	3,152,701,000.00	75%	2,612,347,939.00	75%	5,765,048,939.00	Puskesmas Demangan	Kota Madiun
1	2	2	2	00215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Demangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	646,954,000.00	3 Dokumen	593,706,000.00	6 Dokumen	1,240,660,000.00	Puskesmas Demangan	Kota Madiun
1	2	2	2	00225	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Demangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	655,747,000.00	1 Dokumen	68,641,939.00	2 Dokumen	724,388,939.00	Puskesmas Demangan	Kota Madiun
1	2	2	2	00233	Operasional Pelayanan Puskesmas Demangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	1,850,000,000.00	4 Dokumen	1,950,000,000.00	8 Dokumen	3,800,000,000.00	Puskesmas Demangan	Kota Madiun
					TOTAL				260,968,050,151.00		263,873,771,543.00		524,841,821,694.00		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun tujuan dalam RPD yang terkait langsung dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat.

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang. Indikator berikut merupakan indikator tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
1	Angka Harapan Hidup	Skor	73.13	73.44	73.20	73.25	73.25	Indikator Sasaran Kota
2	Menurunnya Prevelensi Stunting	%	9.7	12.8	11.5	11.0	11.0	Indikator Sasaran Kota
3	Persentase Keluarga Sehat	%	55%	57%	57%	58%	58%	Indikator tujuan PD
4	Persentase rumah tangga sehat	%	64.88%	71.00%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
5	Persentase rumah sehat	%	88.33%	89.70%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
6	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri	%	80.67%	86.43%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
7	Indeks Keluarga Sehat	%	0.55	0.57	0.57	0.58	0.58	Indikator Sasaran PD
8	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi	%	90.00%	95.50%				Indikator Sasaran PD
9	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	%	85.76%	86.13%	-	-	-	Indikator Sasaran PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
10	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart	%	75.00%	78.00%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
11	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	%	98.73%	100.30%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
12	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se- Kota Madiun	Indeks	86.02	87.66	-	-	-	Indikator Sasaran PD
13	Persentase rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	%	97.71%	96.71%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
14	Rata-Rata Indeks Pelayanan Publik Puskesmas dan RSUD di Kota Madiun	Indeks	3.94	4.78	4.78	4.78	4.78	Indikator Sasaran PD
15	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan PP dan KB	Indeks	2.80	4.38	4.39	4.4	4.4	Indikator Sasaran PD
16	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	64.88%	71.00%	71%	71%	71%	program sesuai BA Forum PD Renstra
17	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	91.67%	91.67%	75%	75%	75%	program sesuai BA Forum PD Renstra
18	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	95%	95.50%	95%	96%	96%	Indikator Program PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
19	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	90.72%	88.5%	89%	90%	90%	program sesuai BA Forum PD Renstra
20	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2470	2450	2410	2390	2390	Lppd/Spm
21	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2357	2338	2300	2281	2281	Lppd/Spm
22	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2245	2227	2207	2197	2197	Lppd/Spm
23	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	9145	9081	8981	8981	8981	Lppd/Spm
24	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	31855	31582	31582	31582	31582	Lppd/Spm
25	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	115110	114664	129950	130440	130440	Lppd/Spm
26	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	29585	30573	34490	35580	35580	Lppd/Spm
27	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	38781	42970	40710	41064	41064	Lppd/Spm

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
28	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	8143	7741	8142	8213	8213	Lppd/Spm
29	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	orang	339	339	343	346	346	Lppd/Spm
30	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	5184	5076	5729	6394	6394	Lppd/Spm
31	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		5780	5828	6051	6046	6046	Lppd/Spm
32	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	4.92	5.83	4.91	5.11	5.11	Lppd
33	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	8 Unit	9 Unit	9	10	10	
34	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100%	100%	88,8%	88,8%	88,8%	Lppd
35	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	8 Unit	9 Unit	9	9	9	Lppd
36	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
37	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	5	5	5	5	Lppd

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
38	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	479 orang	497 orang	497 orang	497 orang	497 orang	Lppd
39	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
40	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	Lppd
41	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	454 orang	459 orang	459 orang	459 orang	459 orang	Lppd
42	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
43	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	Lppd
44	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	422 orang	458 orang	458 orang	458 orang	458 orang	Lppd
45	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
46	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9	9	9	9		Lppd
47	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	1253 orang	1241 orang	1241 orang	1241 orang	1241 orang	Lppd
48	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
49	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	5	5	5	5	Lppd

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
50	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	1043 orang	3240 orang	3240 orang	3240 orang	3240 orang	Lppd
51	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
52	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	4	Lppd
53	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	652 orang	617 orang	617 orang	617 orang	617 orang	Lppd
54	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
55	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	Lppd
56	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1178 orang	1201 orang	1201 orang	1201 orang	1201 orang	Lppd
57	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	56.23%	62,03%	60%	60%	60%	Lppd
58	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	Lppd
59	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	193 orang	204 orang	204	204	204	Lppd
60	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd



NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
61	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	Lppd
62	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	207 orang	218 orang	218	218	218	Lppd
63	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
64	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	4	Lppd
65	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	22 orang	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	Lppd
66	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
67	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	Lppd
68	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	300 orang	665 orang	665	665	665	Lppd
69	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
70	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	jenis	4	4	4	4	4	Lppd
71	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	367 orang	375 orang	375	375	375	Lppd

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
72	<i>Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional</i>	%	67.24%	75.51%	68.50%	69.00%	69.00%	Indikator Sasaran PD
73	Persentase Unmet Need	%	6.74%	4.73%	6.80%	6.75%	6.75%	program sesuai BA Forum PD Renstra
74	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	87.37%	87.51%	87.7%	87.8%	87.8%	program sesuai BA Forum PD Renstra
75	Jumlah SSK	SSK	11 SSK	13 SSK	14 SSK	15 SSK	15 SSK	program sesuai BA Forum PD Renstra
76	Jumlah Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	7 KAMPUNG KB	7 Kampung KB	7 Kampung KB	8 Kampung KB	8 Kampung KB	program sesuai BA Forum PD Renstra
77	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6.74%	4.73%	6.80%	6.75%	6.75%	Lppd
78	TFR (Angka Kelahiran Total)		1.94	1.93	1.93	1.92	1.92	
79	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan		Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
80	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		26-30	28	> 21	> 21	> 21	Lppd
81	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	skor	3.79	7.23	< 7,21	< 7,20	< 7,20	Lppd

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
82	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
83	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stake holders	27 Stakeholder	27 Stakeholder	28 Stakeholder	28 Stakeholder	28 Stakeholder	Lppd
84	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67.24%	75.51%	68.50%	69.00%	69.00%	Lppd
85	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
86	Persentase Peserta KBaktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	32.73%	40.02%	40.20%	40.30%	40.30%	Lppd
87	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		63 Kelompok Kerja KKBPK	243 Kelompok Kerja KKBPK	243 Kelompok Kerja KKBPK	243 Kelompok Kerja KKBPK	243 Kelompok Kerja KKBPK	Lppd
88	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	77.90%	78,8% (51,7%/DO baru)	53.00%	54.00%	54.00%	Lppd
89	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		6.74%	4.73%	6.80%	6.75%	6.75%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
90	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	11,11 %	3.70%	3.70%	3.70%	3.70%	Lppd
91	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	Lppd

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2025 –2026 yang berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kota Madiun selama kurun waktu 2 tahun kedepan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun di bidang kesehatan, yang akan menjadi arahan bersama bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun beserta

Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat dan tidak dapat diprediksi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Tentunya rencana strategis ini hanya akan sangat bermanfaat bila semua pelaku pembangunan kesehatan bekerja penuh dedikasi dan berorientasi pada tujuan akhir pembangunan sebagaimana amanah para pendiri Republik Indonesia yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945.

**KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA MADIUN**



**dr. DENIK WURYANI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671227 200212 2 001

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiuntahun 2025-2026 terangkum dalam Tabel 6.1 (T-C.27) berikut ini :







h Jasa Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	14 Laporan	442,400,000	14 Laporan	442,400,000	14 Laporan	884,
aan Barang ah Penunjang merintahan	<b>Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>624,199,300</b>	<b>100%</b>	<b>624,199,300</b>	<b>100%</b>	<b>1,24</b>
h Jasa an, Biaya an dan Pajak Perorangan Kendaraan tan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80	109 Unit	389,312,000	109 Unit	389,312,000	109 Unit	778,
an/Rehabilitasi ntor dan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1 Unit	19,013,900	1 Unit	19,013,900	1 Unit	38,0
an/Rehabilitasi Prasarana ntor atau Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	273	273 Unit	215,873,400	273 Unit	215,873,400	273 Unit	431,
an Pelayanan	<b>Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah (RSUD)</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>76,000,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>76,000,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>152</b>
dan Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	76,000,000,000	1 Unit Kerja	76,000,000,000	1 Unit Kerja	152
<b>I AN UPAYA AN GAN DAN SEHATAN KAT</b>	<b>Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target</b>	<b>91.67%</b>	<b>75%</b>	<b>73,576,691,662</b>	<b>75%</b>	<b>71,497,940,975</b>	<b>75%</b>	<b>145,</b>
h Fasilitas Kesehatan I dan UKP an Daerah /Kota	<b>Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target</b>	<b>91.40%</b>	<b>90.32%</b>	<b>19,359,351,905</b>	<b>91.40%</b>	<b>15,627,332,982</b>	<b>91.40%</b>	<b>34</b>
i dan an Rumah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	550,000,000	1 Unit	600,000,000	2 Unit	1
dan an Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	2 Unit	152,000,000	0 Unit	0 Unit		152,
Alat Alat Medik elayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	778 Unit	100 Unit	609,074,064	105 Unit	609,074,064	105 Unit	1,21
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD)	51 Unit	3 Unit	1,500,000,000	3 Unit	1,500,000,000	6 Unit	3

dan an Alat	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	619	138 Unit	34,940,000	140 Unit	21,964,000	140 Unit	56,9
an Rutin dan t Alat Medik ayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	163	100 Unit	185,000,000	120 Unit	110,000,000	120 Unit	295
ngan Rumah	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	171 Unit	1 Unit	6,353,375,481	1 Unit	3,160,310,857	1 Unit	9
Obat, Bahan i, Bahan s Pakai,, anakan dan i Fasilitas	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	25 Paket	10 paket	2,849,162,360	12 paket	2,500,184,061	12 paket	5,34
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (RSUD)	6 Paket	6 Paket	7,125,800,000	6 Paket	7,125,800,000	6 Paket	14
n Layanan untuk UKM ujukan erah /Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	91.67%	75%	54,217,339,757	75%	55,870,607,993	75%	110
n Pelayanan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2450	2430 Orang	736,197,853	2420 Orang	737,657,666	2420 Orang	1,47
n Pelayanan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2338	2318 Orang	31,805,193	2308 Orang	160,112,293	2408 Orang	191
n Pelayanan Bayi Baru	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2227	2207 Orang	51,188,193	2197 Orang	115,093,020	2197 Orang	166
n Pelayanan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9081	8981 Orang	216,091,905	8941 Orang	255,696,640	8951Orang	471
n Pelayanan pada Usia Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31582	31582 Orang	69,157,126	31582 Orang	94,668,866	31582 Orang	163
n Pelayanan pada Usia	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114664	129950 Orang	48,010,025	130440 Orang	138,161,623	130440 Orang	186
n Pelayanan pada Usia	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30573	34490Orang	228,162,126	35580 Orang	229,196,814	35580 Orang	457

n Pelayanan Penderita	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42970	40710 Orang	127,874,345	41064 Orang	257,610,974	41064 Orang	385
n Pelayanan Penderita Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7741	8142 Orang	204,598,951	8213 Orang	231,849,877	8213 Orang	436
n Pelayanan Orang dengan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	339	343 Orang	55,573,172	346 Orang	120,190,567	346 Orang	175
n Pelayanan Orang Menderita Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5076	5729 Orang	219,039,245	6394 Orang	246,142,362	6394 Orang	465
n Pelayanan Orang dengan Infeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5828	6051 Orang	187,932,427	6046 Orang	240,444,454	6046 Orang	428
n Pelayanan Gizi t	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	1,416,196,900	3 Dokumen	1,416,196,900	3 Dokumen	2,83
n Pelayanan Gizi t Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	381,003,000	3 Dokumen	381,003,000	3 Dokumen	762
n Pelayanan Gizi t Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	342,402,000	3 Dokumen	342,402,000	3 Dokumen	684
n Pelayanan Gizi t Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	486,450,000	3 Dokumen	486,450,000	3 Dokumen	972
n Pelayanan Gizi t Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	296,004,000	3 Dokumen	296,004,000	3 Dokumen	592
n Pelayanan Gizi t Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	672,959,000	3 Dokumen	672,959,000	3 Dokumen	1,34
n Pelayanan Gizi t Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3 Dokumen	593,706,000	3 Dokumen	593,706,000	3 Dokumen	1,18
n Pelayanan Kerja dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3	2 Dokumen	48,158,500	2 Dokumen	48,158,500	2 Dokumen	96,3
n Pelayanan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	5 Dokumen	24,473,500	5 Dokumen	24,473,500	5 Dokumen	48,9
n Surveilans	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	3 Dokumen	53,468,400	3 Dokumen	53,468,400	3 Dokumen	106
n Pelayanan Jiwa dan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	374	343 Orang	14,400,000	346 Orang	14,400,000	346 Orang	28,8
Kesehatan Menular dan alar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	2 Dokumen	422,163,600	2 Dokumen	422,163,600	2 Dokumen	844

Kesehatan Menular dan Tidak Menular Manguharjo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	62,643,292	1 Dokumen	64,603,662	1 Dokumen	127,246,954
Kesehatan Menular dan Tidak Menular Ngegong	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	62,544,289	1 Dokumen	64,044,222	1 Dokumen	126,588,511
Kesehatan Menular dan Tidak Menular Sukosari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	63,775,387	1 Dokumen	65,771,774	1 Dokumen	129,547,161
Kesehatan Menular dan Tidak Menular Tawangrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	59,600,231	1 Dokumen	61,600,231	1 Dokumen	121,200,462
Kesehatan Menular dan Tidak Menular Banjarejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	66,650,191	1 Dokumen	68,650,191	1 Dokumen	135,300,382
Kesehatan Menular dan Tidak Menular Demangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1 Dokumen	66,642,939	1 Dokumen	68,641,939	1 Dokumen	135,284,878
Asuransi Jaminan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36	36 Dokumen	34,050,809,100	36 Dokumen	34,754,525,821	36 Dokumen	68,805,334,921
Perencanaan Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10	9 Dokumen	402,506,900	9 Dokumen	281,754,830	9 Dokumen	684,261,730
Aspek Pelayanan Manguharjo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	1,901,811,750	4 Dokumen	1,930,197,000	4 Dokumen	3,831,998,750
Aspek Pelayanan Ngegong	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	1,612,836,000	4 Dokumen	1,693,478,000	4 Dokumen	3,306,314,000
Aspek Pelayanan Sukosari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	1,740,000,000	4 Dokumen	1,890,000,000	4 Dokumen	3,630,000,000
Aspek Pelayanan Tawangrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	1,608,201,000	4 Dokumen	1,688,611,050	4 Dokumen	3,296,812,050
Aspek Pelayanan Banjarejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	1,850,000,000	4 Dokumen	1,900,000,000	4 Dokumen	3,750,000,000
Aspek Pelayanan Demangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	4 Dokumen	1,900,000,000	4 Dokumen	1,950,000,000	4 Dokumen	3,850,000,000
Aspek Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7	7 Dokumen	1,088,891,017	7 Dokumen	1,088,891,017	7 Dokumen	2,177,782,034
Aspek Akreditasi Kesehatan di Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6	6 Unit	40,680,000	6 Unit	38,896,000	6 Unit	79,576,000
Aspek dan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1 Unit	595,000,000	1 Unit	565,000,000	1 Unit	1,160,000,000
Aspek pelayanan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1179 Orang	43,266,000	1184 Orang	43,266,000	1184 Orang	86,532,000

...n pelayanan ...orang dengan (V)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		575 Orang	31,896,200	646 Orang	31,896,200	646 Orang	63,7
...n pelayanan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		50 Orang	42,570,000	50 Orang	42,570,000	50 Orang	85,1
<b>INDIKATOR KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MADIUN</b>	<b>Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar</b>	<b>92.5</b>	<b>95%</b>	<b>570,985,000</b>	<b>96%</b>	<b>650,686,500</b>	<b>96%</b>	<b>1,22</b>
<b>Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP</b>	<b>95.5</b>	<b>95%</b>	<b>570,985,000</b>	<b>96%</b>	<b>650,686,500</b>	<b>96%</b>	<b>1,22</b>
...ngan Mutu dan ...n Kompetensi ...ber Daya ...esehatan ...erah ...Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	615	650 Orang	570,985,000	700 Orang	650,686,500	700 Orang	1,22
<b>INDIKATOR KUALITAS SEDIAAN ALAT KUKUSAN DAN MINUMAN</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar</b>	<b>88.3</b>	<b>89%</b>	<b>135,964,000</b>	<b>90%</b>	<b>98,421,200</b>	<b>90%</b>	<b>234,</b>
<b>Izin Apotek, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Toko Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar</b>	<b>88</b>	<b>89%</b>	<b>32,464,000</b>	<b>90%</b>	<b>25,971,200</b>	<b>90%</b>	<b>58,4</b>
...an dan ...n serta Tindak Pengawasan Apotek, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Toko Obat (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	2 Dokumen	32,464,000	2 Dokumen	25,971,200	2 Dokumen	58,4
<b>Sertifikat Kebersihan Sanitasi Tempat Pengelolaan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makanan dan Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>	<b>103,500,000</b>	<b>90%</b>	<b>72,450,000</b>	<b>90%</b>	<b>175,</b>
...an dan ...n serta Tindak Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman antara lain Jasa Boga, Rumah Makanan dan Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makanan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3	2 Dokumen	103,500,000	2 Dokumen	72,450,000	2 Dokumen	175,

AYAHAN KAT BIDANG AN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70.36%	71%	3,988,962,210	71%	3,787,002,412	71%	7,77
yaan, Peningkatan a Masyarakat Sektor erah /Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100%	100%	288,849,210	100%	86,889,412	100%	375
n Upaya sehatan, Kemitraan dan raan t	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1 Dokumen	288,849,210	1 Dokumen	86,889,412	1 Dokumen	375
ngan dan an Upaya Bersumber arakat ngkat Daerah /Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kota.		100%	3,700,113,000	100%	3,700,113,000	100%	7,40
Teknis dan engembangan anaan Upaya Bersumber arakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1 Dokumen	3,700,113,000	1 Dokumen	3,700,113,000	1 Dokumen	7,40
ALIAN K	Meningkatnya Jumlah SSK	13	14 SSK	243,474,000	15 SSK	244,288,800	15 SSK	487
	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	7	7 Kampung KB		8 Kampung KB		8 Kampung KB	
dan si Kebijakan n Daerah engan n Daerah /Kota dalam ngendalian Penduduk	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	6	6 Sekolah	41,429,000	7 Sekolah	24,857,400	7 Sekolah	66,2
n dan ngan Materi	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	7	13 Dokumen	41,429,000	13 Dokumen	24,857,400	13 Dokumen	66,2
kan Jalur Formal sesuai abupaten/Kota								
Perkiraan ian Penduduk Daerah /Kota	Persentase data keluarga yang diupdating	100	100%	202,045,000	100%	219,431,400	100%	421
dan an Data	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27	27 Laporan	133,924,000	27 Laporan	166,448,400	27 Laporan	300

n dan Data an Lapangan an KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		27 Dokumen	68,121,000	27 Dokumen	52,983,000	27 Dokumen	121,
<b>PEMBINAAN A NA (KB)</b>	<b>Menurunnya <i>Unmet Need</i></b>	<b>4.73</b>	<b>6.80%</b>	<b>2,368,627,184</b>	<b>6.75%</b>	<b>1,512,287,784</b>	<b>6.75%</b>	<b>3,88</b>
an Advokasi, si, Informasi si (KIE) ian Penduduk suai Kearifan kal	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>713,411,600</b>	<b>100%</b>	<b>553,876,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,26</b>
an Program	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4	2 Laporan	80,000,000	2 Laporan	80,000,000	2 Laporan	160,
n dan Distribusi Program ncana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		4 Unit	49,688,000	4 Unit	49,688,000	4 Unit	99,3
n Operasional di Balai n Bangga	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	56	12 Laporan	308,227,200	12 Laporan	192,642,000	12 Laporan	500,
n Mekanisme l Program ncana melalui dinasi (Rakorcam), dinasi Desa , dan Mini (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		9 Laporan	39,000,000	9 Laporan	39,000,000	9 Laporan	78,0
n KIE Program ncana Melalui sa Cetak dan serta Media g	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		3 Dokumen	100,298,000	3 Dokumen	100,298,000	3 Dokumen	200,
, Informasi si (KIE) ngga Kencana rifan Budaya	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		2 Dokumen	16,198,400	2 Dokumen	20,248,000	2 Dokumen	36,4
rogram ncana oleh kasi kepada rs dan Mitra	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		27 Organisasi	120,000,000	27 Organisasi	72,000,000	27 Organisasi	192,



naan Tenaga KB/Petugas KB)	Persentase kader yang melakukan updating data	100	100%	67,200,000	100%	67,200,000	100%	134,
an Kader Masyarakat (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150	150 Orang	67,200,000	150 Orang	67,200,000	150 Orang	134,
ian dan usian Alat dan asepsi serta an Pelayanan ah /Kota	Persentase faskes yang mendapatkan distribusi alkon	100	100%	1,294,733,584	100%	715,242,584	100%	2,00
an sian Alat dan asepsi dan unjang KB ke Fasilitas Termasuk an Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25	24 Laporan	13,000,000	24 Laporan	13,000,000	24 Laporan	26,0
n Kesertaan n Metode i Jangka KJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	822	661 Orang	284,898,884	661 Orang	284,898,884	661 Orang	569,
n Sarana Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2	1 Unit	985,134,700	1 Unit	405,643,700	1 Unit	1,39
Pelayanan erencana dan Reproduksi di ehatan Jaringan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	4 Laporan	11,700,000	4 Laporan	11,700,000	4 Laporan	23,4
yaan dan an Peran nisasi akatan erah /Kota dalam an Pelayanan naan Ber-KB	Persentase Poktan dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	100	100%	293,282,000	100%	175,969,200	100%	469,
n dan n Program ncana di Keluarga	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7	7 Kampung	293,282,000	7 Kampung	175,969,200	7 Kampung	469,
AYAAAN DAN ATAN A RA (KS)	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	87.51	87.70%	1,225,035,600	87.80%	585,268,800	87.80%	1,81
an an Keluarga mbinaan dan aan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	31	32%	1,225,035,600	32%	585,268,800	32%	1,81



n Sosialisasi Kegiatan dan aan Keluarga (BKL, PPKS, Usaha n Pendapatan kseptor	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32	32 Laporan	60,960,000	32 Laporan	36,576,000	32 Laporan	97,5
elatihan ksana/Kader dan aan Keluarga (BKL, PPPKS, aan Ekonomi PPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	210	210 Orang	163,725,600	210 Orang	81,862,800	210 Orang	245
n Biaya il bagi dan Pelaksana ahanan dan aan Keluarga (BKL, PPPKS, berdayaan PPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	225	250 Orang	1,000,350,000	270 Orang	466,830,000	300 Orang	1,46

Tabel 6.1 (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun tujuan dalam RPD yang terkait langsung dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat.

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

dalam lima tahun mendatang. Indikator berikut merupakan indikator tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
1	Angka Harapan Hidup	Skor	73.13	73.44	73.20	73.25	73.25	Indikator Sasaran Kota
2	Menurunnya Prevelensi Stunting	%	9.7	12.8	10.08	9.08	9.08	Indikator Sasaran Kota
3	Persentase Keluarga Sehat	%	55%	57%	57%	58%	58%	Indikator tujuan PD
4	Persentase rumah tangga sehat	%	64.88%	71.00%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
5	Persentase rumah sehat	%	88.33%	89.70%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
6	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri	%	80.67%	86.43%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
7	Indeks Keluarga Sehat	%	0.55	0.57	0.57	0.58	0.58	Indikator Sasaran PD
8	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi	%	90.00%	95.50%				Indikator Sasaran PD
9	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	%	85.76%	86.13%	-	-	-	Indikator Sasaran PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
10	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart	%	75.00%	78.00%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
11	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	%	98.73%	100.30%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
12	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se- Kota Madiun	Indeks	86.02	87.66	-	-	-	Indikator Sasaran PD
13	Persentase rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	%	97.71%	96.71%	-	-	-	Indikator Sasaran PD
14	Rata-Rata Indeks Pelayanan Publik Puskesmas dan RSUD di Kota Madiun	Indeks	3.94	4.78	4.78	4.78	4.78	Indikator Sasaran PD
15	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan PP dan KB	Indeks	2.80	4.38	4.39	4.4	4.4	Indikator Sasaran PD
16	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	64.88%	71.00%	71%	71%	71%	program sesuai BA Forum PD Renstra
17	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	91.67%	91.67%	75%	75%	75%	program sesuai BA Forum PD Renstra
18	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	95%	95.50%	95%	96%	96%	Indikator Program PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
19	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	90.72%	88.5%	89%	90%	90%	program sesuai BA Forum PD Renstra
20	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2470	2450	2410	2390	2390	Lppd/Spm
21	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2357	2338	2300	2281	2281	Lppd/Spm
22	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2245	2227	2207	2197	2197	Lppd/Spm
23	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	9145	9081	8981	8981	8981	Lppd/Spm
24	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	31855	31582	31582	31582	31582	Lppd/Spm
25	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	115110	114664	129950	130440	130440	Lppd/Spm
26	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	29585	30573	34490	35580	35580	Lppd/Spm
27	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	38781	42970	40710	41064	41064	Lppd/Spm

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
28	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	8143	7741	8142	8213	8213	Lppd/Spm
29	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	orang	339	339	343	346	346	Lppd/Spm
30	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	5184	5076	5729	6394	6394	Lppd/Spm
31	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		5780	5828	6051	6046	6046	Lppd/Spm
32	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	4.92	5.83	4.91	5.11	5.11	Lppd
33	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	8 Unit	9 Unit	9	10	10	
34	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100%	100%	88,8%	88,8%	88,8%	Lppd
35	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	8 Unit	9 Unit	9	9	9	Lppd
36	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
37	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	5	5	5	5	Lppd

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
38	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	479 orang	497 orang	497 orang	497 orang	497 orang	Lppd
39	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
40	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	Lppd
41	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	454 orang	459 orang	459 orang	459 orang	459 orang	Lppd
42	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
43	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	Lppd
44	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	422 orang	458 orang	458 orang	458 orang	458 orang	Lppd
45	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
46	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9	9	9	9		Lppd
47	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	1253 orang	1241 orang	1241 orang	1241 orang	1241 orang	Lppd
48	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
49	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	5	5	5	5	Lppd

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
50	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	1043 orang	3240 orang	3240 orang	3240 orang	3240 orang	Lppd
51	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
52	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	4	Lppd
53	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	652 orang	617 orang	617 orang	617 orang	617 orang	Lppd
54	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
55	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	Lppd
56	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1178 orang	1201 orang	1201 orang	1201 orang	1201 orang	Lppd
57	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	56.23%	62,03%	60%	60%	60%	Lppd
58	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	Lppd
59	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	193 orang	204 orang	204	204	204	Lppd
60	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd



NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
61	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	Lppd
62	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	207 orang	218 orang	218	218	218	Lppd
63	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
64	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	4	Lppd
65	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	22 orang	64 orang	64 orang	64 orang	64 orang	Lppd
66	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
67	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	Lppd
68	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	300 orang	665 orang	665	665	665	Lppd
69	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
70	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	jenis	4	4	4	4	4	Lppd
71	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	367 orang	375 orang	375	375	375	Lppd

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
72	<i>Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional</i>	%	67.24%	75.51%	68.50%	69.00%	69.00%	Indikator Sasaran PD
73	Persentase Unmet Need	%	6.74%	4.73%	6.80%	6.75%	6.75%	program sesuai BA Forum PD Renstra
74	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	87.37%	87.51%	87.7%	87.8%	87.8%	program sesuai BA Forum PD Renstra
75	Jumlah SSK	SSK	11 SSK	13 SSK	14 SSK	15 SSK	15 SSK	program sesuai BA Forum PD Renstra
76	Jumlah Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	7 KAMPUNG KB	7 Kampung KB	7 Kampung KB	8 Kampung KB	8 Kampung KB	program sesuai BA Forum PD Renstra
77	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6.74%	4.73%	6.80%	6.75%	6.75%	Lppd
78	TFR (Angka Kelahiran Total)		1.94	1.93	1.93	1.92	1.92	
79	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan		Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
80	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		26-30	28	> 21	> 21	> 21	Lppd
81	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	skor	3.79	7.23	< 7,21	< 7,20	< 7,20	Lppd

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
82	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
83	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stake holders	27 Stakeholder	27 Stakeholder	28 Stakeholder	28 Stakeholder	28 Stakeholder	Lppd
84	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67.24%	75.51%	68.50%	69.00%	69.00%	Lppd
85	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
86	Persentase Peserta KBaktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	32.73%	40.02%	40.20%	40.30%	40.30%	Lppd
87	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		63 Kelompok Kerja KKBPK	243 Kelompok Kerja KKBPK	243 Kelompok Kerja KKBPK	243 Kelompok Kerja KKBPK	243 Kelompok Kerja KKBPK	Lppd
88	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	77.90%	78,8% (51,7%/DO baru)	53.00%	54.00%	54.00%	Lppd
89	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		6.74%	4.73%	6.80%	6.75%	6.75%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI AWAL PERIODE RPD		TARGET		Akhir Periode RPD	Label
			2022	2023	2025	2026		
90	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	11,11 %	3.70%	3.70%	3.70%	3.70%	Lppd
91	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	Lppd

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2025 –2026 yang berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kota Madiun selama kurun waktu 2 tahun kedepan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun di bidang kesehatan, yang akan menjadi arahan bersama bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun beserta

Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat dan tidak dapat diprediksi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Tentunya rencana strategis ini hanya akan sangat bermanfaat bila semua pelaku pembangunan kesehatan bekerja penuh dedikasi dan berorientasi pada tujuan akhir pembangunan sebagaimana amanah para pendiri Republik Indonesia yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945.

**KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA MADIUN**



**dr. DENIK WURYANI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671227 200212 2 001